

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TA 2023



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Tahunan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Klaten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Klaten, 17 Januari 2024
KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS

IKA NURMALIYANA DEWI, SE, MAP
NIP. 197906282009122002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
1. Laporan Realisasi Anggaran	6
2. Neraca	7
3. Laporan Operasional	8
4. Laporan Perubahan Ekuitas	9
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
Lampiran dan Daftar	39



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor : 39 Klaten Kode pos 57411
Telepon (0272) 321494,322670 Fax (0272) 327200

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 17 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS


NIRMA NURMALIANA DEWI, SE, MAP
NIP 197906282009122002

Laporan Keuangan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 21.100.000,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 65.439.213.290,- atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 68.064.744.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 25.510.102.297,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 24.293.554.851,- Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 782.583.154,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 431.514.542,- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 2.449.750,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 25.510.102.297,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,-. sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 63.541.443.913,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. 63.541.443.913,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp. 63.541.443.913,- sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp 63.541.443.913,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 901.953.148,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 63.541.443.913,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 4.400.000,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 88,153,993,062,- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 25.510.102.297,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	21.100.000	0,00	86.720.522
JUMLAH PENDAPATAN		-	21.100.000	0,00	86.720.522
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.749.074.000	2.603.592.288	94,71	2.398.751.301
Belanja Barang	B.4	65.027.789.000	62.548.896.510	96,19	1.598.455.106
Belanja Modal	B.5	287.881.000	286.724.492	99,60	211.900.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
Pinjaman dan Hibah	B.7	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		68.064.744.000	65.439.213.290	96,14	4.209.106.407

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	20.800.000.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
BAGIAN LANCAR TP/TGR (NETTO)	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	863.256.479	-
Persediaan	C.10	2.630.298.372	-
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		24.293.554.851	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.12	433.811.097	459.311.097
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP TGR	C.13	(2.296.555)	(2.296.555)
TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	C.14	431.514.542	457.014.542
Jumlah Piutang Jangka Panjang		431.514.542	457.014.542
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	2.557.884.301	2.181.159.809
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.21	(1.775.301.147)	(1.682.121.928)
Jumlah Aset Tetap		782.583.154	499.037.881
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	805.908.441	905.380.441
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.24	(803.458.691)	(901.705.816)
Jumlah Aset Lainnya		2.449.750	3.674.625
JUMLAH ASET		25.510.102.297	959.727.048
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	-	57.773.900
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	57.773.900
JUMLAH KEWAJIBAN		-	57.773.900
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	25.510.102.297	901.953.148
JUMLAH EKUITAS		25.510.102.297	901.953.148
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.510.102.297	959.727.048

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.545.818.388	2.456.525.201
Beban Persediaan	D.3	7.483.500	60.225.320
Beban Barang dan Jasa	D.4	58.771.581.890	701.973.186
Beban Pemeliharaan	D.5	104.589.553	51.774.653
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.017.566.488	785.513.267
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	94.404.094	240.199.033
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(2.274.555)
JUMLAH BEBAN		63.541.443.913	4.293.936.105
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(63.541.443.913)	(4.293.936.105)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	60.319.414
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	60.319.414
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	-	485.712.205
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	5.156.600
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	480.555.605
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	540.875.019
POS LUAR BIASA	D.15		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(63.541.443.913)	(3.753.061.086)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	901.953.148	1.016.104.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(63.541.443.913)	(3.753.061.086)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(4.400.000)	(483.475.651)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	(4.400.000)	(483.475.651)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	88.153.993.062	4.122.385.885
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	24.608.149.149	(114.150.852)
EKUITAS AKHIR	E.6	25.510.102.297	901.953.148

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

*Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS KPU

Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga

legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

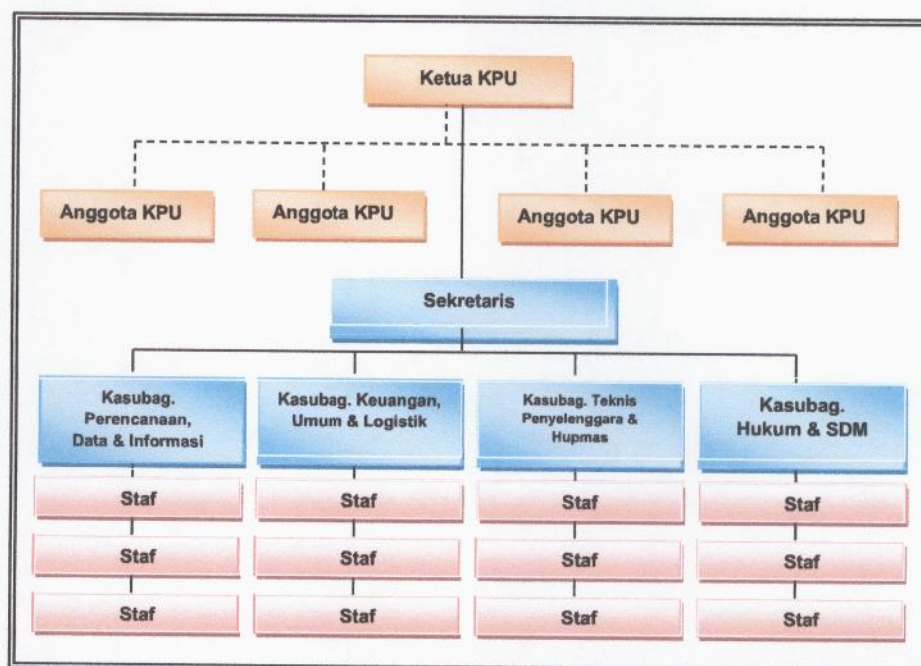
- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sumber Daya manusia (SDM) dan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	STATUS
1	Strata 2	2	2	4	PNS
2	Strata 1	6	2	8	PNS
3	Diploma III	1	0	1	PNS
4	SLTA	3	0	3	PNS
5	SLTP	0	0	0	PNS
6	PPNPN	6	5	11	PPNPN

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terutama pada Modul GL dan Pelaporan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Salah satu Modul yang menjadi bagian di dalam SAKTI adalah Modul GL dan Pelaporan yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menggantikan fungsi SAIBA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi
atas Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(4) Kewajiban Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi
Atas
Ekuitas
Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan TA 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan.

- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2023 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2023, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah Rp.
21.100.000,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 21.100.000,- Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	21.100.000	-
		-	-
Jumlah	-	21.100.000	-

Realisasi Belanja
Negara
Rp. 65.439.213.290

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 65.439.213.290,- atau 96,14 persen dari anggaran senilai Rp. 68.064.744.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.749.074.000	2.603.592.288	94,71
Belanja Barang	65.027.789.000	62.548.896.510	96,19
Belanja Modal	287.881.000	286.724.492	99,60
Belanja Hibah	0	0	0
Total Belanja	68.064.744.000	65.439.213.290	96,14

Belanja Pegawai
Rp. 2.603.592.288

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2023 meliputi : Belanja Gaji

dan Tunjangan PNS; Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2023			TA. 2022			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Pegawai	2.749.074.000	2.603.592.288	94,71%	2.457.550.000	2.398.751.301	97,61%	-2,90%

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.603.592.288,- dan Rp 2.398.751.301,-. Prosentase realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 2,90 persen dari prosentase realisasi belanja TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Penambahan Pagu Belanja Pegawai di TA 2023 sebesar 10,6% lebih banyak dibandingkan Pagu Belanja Pegawai TA yang lalu dan
2. Adanya Pegawai yang Pensiun.

Belanja Barang
Rp 62.548.896.510

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.548.896.510,- dan Rp. 1.598.455.106,-.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2023			TA. 2022			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Barang	65.027.789.000	62.548.896.510	96,19%	1.750.151.000	1.598.455.106	91,33%	4,86%

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa Prosentase Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,86 persen dari Prosentase Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Belanja Modal
Rp.286.724.492,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 286.724.492,- dan Rp. 211.900.000,-. Pada Tahun Anggaran 2023, KPU Kabupaten Klaten memperoleh alokasi Pagu Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 287.881.000,-. Prosentase Realisasi Belanja Modal KPU Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebesar 99,60%.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2023 sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ada Pagu Anggaran Bantuan Sosial.

Belanja Hibah
Rp.0,-

B.7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2023 sama dibandingkan Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 tidak ada Dana Hibah.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. Rp. 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.20.800.000.000*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 20.800.000.000,-. Saldo ini merupakan Dana Hibah Pilkada Klaten 2024 Termin I yang diterima oleh KPU Kabupaten dari Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2023 namun belum dipergunakan karena belum memasuki Tahapan Pilkada 2024.

*Piutang Bukan
Pajak Rp 0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang Bukan Pajak.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,-

*Bagian Lancar TPA
Rp 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar.

Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp.0,-

C.8 Bagian Lancar TP/TGR (Netto)

Nilai Bagian Lancar TP/TGR (Netto) untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,-

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp. 863.256.479,-

C.9 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 863.256.479,-. Saldo ini berasal dari Biaya Sewa Gudang Logistik Pemilu 2024 yang sudah dibayarkan di Tahun Anggaran 2023 dan belum selesai diambil manfaatnya hingga akhir periode pelaporan.

Persediaan
Rp 2.630.298.372,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.630.298.372,- dan Rp 0,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

Jenis	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	-	-
Bahan Baku	2.630.298.372	-
Persediaan Lainnya	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah	2.630.298.372	-

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp 433.811.097,-

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2023 dan 2022 memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp. 433.811.097,- dan Rp. 459.311.097,-. Adapun Rincian dari Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

Tgl. Setoran	NTPN	NTB/NTP	Nominal	Saldo Piutang TP/TGR
Saldo Awal 2023				454.911.097
02/01/2023	B75B16U8ECI8578R	001195900059	2.200.000	452.711.097
01/02/2023	BCD9348VV56EJTJG	001195900006	2.200.000	450.511.097
02/03/2023	8A8446U8EKUDINN3	001195900009	2.200.000	448.311.097
03/04/2023	7D4D68N3EA67VV5P	001195900037	2.200.000	446.111.097
02/05/2023	0E83C6U8EL4C2PVL	001195900007	2.200.000	443.911.097
05/06/2023	2A23E5DF02K4MQV	001195900057	2.200.000	441.711.097
03/07/2023	9B9A05DF05GSDD9	001195900038	2.200.000	439.511.097
01/08/2023	07D3E8N3EAI689N3	001195900021	2.200.000	437.311.097
03/11/2023	0C8351JNFMA42VLH	001195900052	1.300.000	436.011.097
01/12/2023	296746U8ELP9FCL5	001195900129	2.200.000	433.811.097

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Tagihan TP/TGR
Rp. 2.296.555,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2023 dan 2022 melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp. 2.296.555,-

Tagihan TP/TGR
(Netto)
Rp. 431.514.542,-

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto

Adapun Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 431.514.542,- dan Rp. 457.014.542,-

Tanah
Rp 0,-

C.15 Tanah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset Berupa Tanah.

Peralatan dan
Mesin
Rp.2.557.884.301

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yaitu Rp. 2.557.884.301,- dan saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.181.159.809,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.181.159.809
Mutasi tambah:	
Peralatan dan Mesin	376.724.492
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.557.884.301

Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0,-

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya
Rp 0,-

C.19 Aset Tetap Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset tetap Lainnya

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp.0,-

C.20 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,-.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.1.775.301.147,-

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp 1.775.301.147,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.557.884.301	1.775.301.147	782.583.154
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		2.557.884.301	1.775.301.147	782.583.154

Aset Tidak
Berwujud Rp 0,-

C.22 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp.805.908.441,-

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 805.908.441,- dan Rp 905.380.441,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
803.458.691,-

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 803.458.691,- dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 57.773.900,-*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.57.773.900,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp 0,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Pendapatan diterima di muka.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp
0,-*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki beban yang masih harus dibayar.

*Ekuitas
Rp 901.953.148,-*

C.29 Ekuitas

Ekuitas KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 25.510.102.297,- dan Rp 901.953.148,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB
Rp 0,-*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Beban Pegawai
Rp.2.545.818.388,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.545.818.388,- dan Rp 2.456.525.201,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban Persediaan
Rp. 7.483.500,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.483.500,- dan Rp 60.225.320,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp58.771.581.890,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 58.771.581.890,- dan Rp 701.973.186,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan
Rp.104.589.553,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 104.589.553,- dan Rp 51.774.653,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.2.017.566.488,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.017.566.488,- dan Rp 785.513.267,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp 0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.94.404.094,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 94.404.094,- dan Rp. 240.199.033,-. Beban Penyusutan

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 2.274.555,-.

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar Rp.0,-*

D.11 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 60.319.414,-.

*Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp.0,-*

D.12 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp.0,-*

D.13 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 485.712.205,-.

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp.0,-*

D.14 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 5.156.600,-.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp. 0,-*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0,-*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp. 0,-.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp 0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Pos Luar Biasa Rp

0,-

D.15 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.901.953.148,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 901.953.148,- dan Rp1.016.104.000,-.

Defisit LO

Rp.63.541.443.913,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 63.541.443.913,- dan Rp 3.753.061.086,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/Mengu-

rangi Ekuitas

Rp.4.400.000,-

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 4.400.000,- dan Rp 483.475.651,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan Rp.0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Lain-Lain
Rp 0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.88.153.993.062

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 88.153.993.062,- dan Rp 4.122.385.885,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp.25.510.102.297

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.510.102.297,- dan Rp. 901.953.148,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 17/01/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 17/01/24 10:08 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	20,800,000,000	0	20,800,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	863,256,479	0	863,256,479	0.00
Persediaan	2,630,298,372	0	2,630,298,372	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	24,293,554,851	0	24,293,554,851	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,557,884,301	2,181,159,809	376,724,492	17.27
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,775,301,147)	(1,682,121,928)	(93,179,219)	5.54
JUMLAH ASET TETAP	782,583,154	499,037,881	283,545,273	56.82
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	433,811,097	459,311,097	(25,500,000)	(5.55)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,296,555)	(2,296,555)	0	0.00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	431,514,542	457,014,542	(25,500,000)	(5.58)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	431,514,542	457,014,542	(25,500,000)	(5.58)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	805,908,441	905,380,441	(99,472,000)	(10.99)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(803,458,691)	(901,705,816)	98,247,125	(10.90)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,449,750	3,674,625	(1,224,875)	(33.33)
JUMLAH ASET	25,510,102,297	959,727,048	24,550,375,249	2,558.06
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	57,773,900	(57,773,900)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	57,773,900	(57,773,900)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	57,773,900	(57,773,900)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,510,102,297	901,953,148	24,608,149,149	2,728.32
JUMLAH EKUITAS	25,510,102,297	901,953,148	24,608,149,149	2,728.32
JUMLAH EKUITAS	25,510,102,297	901,953,148	24,608,149,149	2,728.32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,510,102,297	959,727,048	24,550,375,249	2,558.06

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 17/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 17/01/24 10:08 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN KLATEN 657480

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 17/01/24 10:10 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	21,100,000	21,100,000	0	0	86,720,522	86,720,522	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	21,100,000	21,100,000	0	0	86,720,522	86,720,522	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	21,100,000	21,100,000	0	0	86,720,522	86,720,522	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	68,064,744,000	65,439,213,290	(2,625,530,710)	96	4,423,201,000	4,209,106,407	(214,094,593)	95
1. Belanja Pegawai	2,749,074,000	2,603,592,288	(145,481,712)	95	2,457,550,000	2,398,751,301	(58,798,699)	98
2. Belanja Barang	65,027,789,000	62,548,896,510	(2,478,892,490)	96	1,750,151,000	1,598,455,106	(151,695,894)	91
3. Belanja Modal	287,881,000	286,724,492	(1,156,508)	100	215,500,000	211,900,000	(3,600,000)	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN KLATEN 657480

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 17/01/24 10:10 AM
Halaman : 2
lap_irr_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	68,064,744,000	65,439,213,290	(2,625,530,710)	96	4,423,201,000	4,209,106,407	(214,094,593)	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KLATEN, 17 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IKA NURRIZALIANA DEWI

18/902562009122002



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 17/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 17/01/24 10:09 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	901,953,148	1,016,104,000	(114,150,852)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(63,541,443,913)	(3,753,061,086)	(59,788,382,827)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,400,000)	(483,475,651)	479,075,651	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
LAIN-LAIN	(4,400,000)	(483,475,651)	479,075,651	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	88,153,993,062	4,122,385,885	84,031,607,177	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	24,608,149,149	(114,150,852)	24,722,300,001	-
EKUITAS AKHIR	25,510,102,297	901,953,148	24,608,149,149	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KLATEN, 17 Januari 2024

Pengantar Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



IKA NURMALIANA DEWI
197906282009122002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 17/01/24 10:08 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,545,818,388	2,456,525,201	89,293,187	3.635
Beban Persediaan	7,483,500	60,225,320	(52,741,820)	(87.574)
Beban Barang dan Jasa	58,771,581,890	701,973,186	58,069,608,704	8,272.34
Beban Pemeliharaan	104,589,553	51,774,653	52,814,900	102.009
Beban Perjalanan Dinas	2,017,566,488	785,513,267	1,232,053,221	156.847
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 17/01/24 10:08 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	94,404,094	240,199,033	(145,794,939)	(60.698)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(2,274,555)	2,274,555	(100)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	63,541,443,913	4,293,936,105	59,247,507,808	1,379.7 95
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(63,541,443,913)	(4,293,936,105)	(59,247,507,808)	1,379.7 95
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	60,319,414	(60,319,414)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	60,319,414	(60,319,414)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	480,555,605	(480,555,605)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	485,712,205	(485,712,205)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5,156,600	(5,156,600)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	540,875,019	(540,875,019)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(63,541,443,913)	(3,753,061,086)	(59,788,382,827)	1,593.0 56
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(63,541,443,913)	(3,753,061,086)	(59,788,382,827)	1,593.0 56

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

KLATEN, 17 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



IKA NURMALIANA DEWI

197906282009122002